



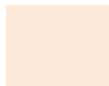
PERUBAHAN RENJA KANTOR CAMAT HALONGONAN TAHUN 2025

KECAMATAN HALONGONAN
2025



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		i
KATA PENGANTAR		1
BAB I	PENDAHULUAN	2
1.1	Latar Belakang	2
1.2	Landasan Hukum	3
1.3	Maksud dan Tujuan	4
1.4	Sistematika Penulisan	4
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN PERUBAHAN RENJA KANTOR CAMAT HALONONGAN TAHUN LALU	6
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Perubahan Renja Kantor Camat Halongonan dan Capaian Renstra SKPD	6
BAB III	PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	10
3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah	10
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	10
3.3	Program dan Kegiatan	11
BAB IV	PENUTUP	17



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, atas rahmat dan karunia-nya, kami telah dapat menyusun Dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Halongonan Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Halongonan.

Dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Halongonan Tahun 2025 ini memuat tujuan dan sasaran yang harus dicapai dan ada beberapa program kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator dan pagu indikatif tahun 2025.

Ucapan terima kasih kami kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renja ini, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semua pihak dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.



SIKATIAN SIREGAR, S.STP, MM
NIP. 19630802 200312 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan Pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Halongonan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun secara rutin oleh perangkat daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kewenangan konkuren perangkat daerah berdasarkan bidang urusan/unsur. Perubahan Renja Perangkat daerah disusun secara simultan bersama dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025, sebagai bahan yang tidak terpisahkan dalam substansi RKPD.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Halongonan Tahun 2025 sedikit berbeda dengan penyusunan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang. Aturan ini menggeser penyelenggaraan pilkada tahun 2023 menjadi pilkada serentak yang dilaksanakan pada Bulan November Tahun 2025.

Atas peraturan diatas sejalan dengan disusunnya Renstra Perangkat Daerah tahun 2024-2026. Dokumen Renstra PD tahun 2024-2026 inilah yang akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah untuk menyusun dokumen renja yang berlaku untuk tahun 2025, dan 2026. Sehubungan dengan ditetapkannya dokumen RPD dan Renstra PD tahun 2024- 2026, penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam substansi Renstra PD tahun 2024-2026.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Dasar Hukum dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dalam peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2013 Nomor 440 tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara 2015-2035;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;

11. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025-2026;
12. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Lawas Utara;
13. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara No. 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025
14. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara No.32 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

a) Maksud

Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Halongonan disusun dengan maksud untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memberikan arah bagi pembangunan wilayah tahun 2025.

b) Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Renja Perubahan adalah :

1. Menjadi landasan penyusunan KUA PPAS tahun 2025 dalam penyusunan RAPBD tahun 2025.
2. Mewujudkan tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Halongonan tahun 2025.
3. Dasar untuk melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025.
4. Sebagai dasar tolak ukur dalam mengevaluasi kinerja tahunan yang dicapai.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Halongonan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI R PERUBAHAN RENJA KECAMATAN HALONGONA
TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Halongonan Tahun Lalu
dan Capaian Renstra Kecamatan Halongonan

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat daerah ditujukan mengidentifikasi kemampuan PD dalam melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program kegiatan dan sub kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang terjadi. Tercapai tidaknya pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan pembangunan tahun lalu pada Kecamatan Halongonan, dapat dilihat pada tabel berikut :

1.3.5			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	1,800,000	0	0	0									
1.3.6		4.01.07.0 1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	1,500,000	4	250,000	0	0								
1.3.7			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	1,950,000	0	0	0	0								
1.4		4.01.07.0 1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	19,602,000	1	2,526,550	0	0								
1.4.1			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	19,602,000	1	2,526,550	0	0								
1.6		4.01.07.0 1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		165,734,000	9	41,350,945	3	40,483,500								
1.6.1			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	800,000	4	300,000	0	0								
1.6.2			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	3,000,000	2	567,445	0	0								
1.6.3			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	161,934,000	3	40,483,500	3	40,483,500								
											Rata- Rata Capaian Kinerja				0.00%			
											Predikat Kinerja				Sedang			
2	â€ Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dengan Indikator Pembangunan Yakni Predikat Akuntabilitas Kinerja	4.01.07.0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Terlaksananya KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1	19,134,000	0	0	1	6,830,000								KECAMATAN HALONGONAN
2.1		4.01.07.0 4.1	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1	19,134,000	0	0	1	6,830,000								

2.1.1		4.01.07.0 4.1.1	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	19,134,000	0	0	1	6,830,000								
Rata- Rata Capaian Kinerja															0.00%			
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi			
3	â€¢ Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dengan Indikator Pembangunan Yakni Predikat Akuntabilitas Kinerja	4.01.07.0 6	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0	9,080,000	0	0	0	0								KECAMATAN HALONGONAN
3.1		4.01.07.0 6.1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1	9,080,000	0	0	0	0								
3.1.1		4.01.07.0 6.1.1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1	9,080,000	0	0	0	0								
Rata- Rata Capaian Kinerja															0.00%			
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi			
3	â€¢ Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dengan Indikator Pembangunan Yakni Predikat Akuntabilitas Kinerja	4.01.07.0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	-	13,938,000	1	5,350,000	1	7,488,000								KECAMATAN HALONGONAN
3.1		4.01.07.0 6.1	Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	1	13,938,000	1	5,350,000	1	7,488,000								
3.1.1		4.01.07.0 6.1.1	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1	13,938,000	1	5,350,000	1	7,488,000								
Rata- Rata Capaian Kinerja															0.00%			
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi			

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Dan proram kegiatan yang disusun berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2024 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

RPD (Rencana Pembangunan Daerah) 2024-2026 Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sebuah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah, termasuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan mengurangi stunting. Dokumen ini disusun berdasarkan berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah tentang perencanaan pembangunan, pemerintahan daerah, dan penataan ruang.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Kecamatan Halongonan

Pada tahun 2025 merupakan tahun ke-kedua (Ke-2) periode Renstra Tahun 2024-2026 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026.

Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Halongonan Tahun 2025 diselaraskan dengan tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026.

- **Tujuan:**

Rencana ini disusun untuk mengatasi berbagai permasalahan dan hambatan pembangunan daerah, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

- **Dasar Hukum:**

Penyusunan RPD didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk UU No. 38 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas, UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- **Pendekatan:**

Dokumen ini menggunakan pendekatan "atas-bawah" (top-down) dan "bawah-atas" (bottom-up) untuk memastikan perencanaan yang partisipatif dan efektif.

- **Visi dan Misi:**

RPD ini memuat visi dan misi yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam periode 2024-2026.

3.3 Program dan Kegiatan

Program Kecamatan Halongonan merupakan program prioritas Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Halongonan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu Kecamatan Halongonan sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RKPD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026 dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub Kegiatan Tahun 2025 terdiri dari 5 Program, 8 kegiatan dan 17 Sub kegiatan, sebagaimana rincian meliputi berikut :

1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
		9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	3		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		11	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	4		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
	5		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
		14	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan minimal di Wilayah Kecamatan

3			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	6		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
		15	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
4			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
	7		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
		16	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
	8		Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		17	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan

Untuk lebih jelasnya Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Rangkui pada tahun 2025 terdapat dalam tabel berikut

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN HALONGONAN								2.486.642.235,00	2.481.728.834,00	2.413.310.942,00	-73.331.293,00						2.847.835.837,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.486.642.235,00	2.481.728.834,00	2.413.310.942,00	-73.331.293,00							2.847.835.837,00	
	7.01	KECAMATAN							2.486.642.235,00	2.481.728.834,00	2.413.310.942,00	-73.331.293,00							2.847.835.837,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kab/kota				100 Persen	100 Persen	2.442.485.535,00	2.437.572.134,00	2.304.157.042,00	348.169.302,00							2.790.654.837,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan				1 Tahun	1 Tahun	2.227.349.335,00	2.222.435.934,00	2.092.220.842,00	-135.128.493,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Halongonan		2.594.074.332,00	KECAMATAN HALONGONAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46 Orang/b ulan	46 Orang/b ulan	2.164.589.335,00	2.159.675.934,00	2.074.220.842,00	-90.368.493,00	Kab. Padang Lawas Utara, Halongonan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			2.539.324.332,00	KECAMATAN HALONGONAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	62.760.000,00	62.760.000,00	18.000.000,00	-44.760.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Halongonan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			54.750.000,00	KECAMATAN HALONGONAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan				1 Tahun	0 Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Halongonan		0,00	KECAMATAN HALONGONAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Halongonan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			0,00	KECAMATAN HALONGONAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	29.900.200,00	29.900.200,00	26.600.200,00	-3.300.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Halongonan		34.703.505,00	KECAMATAN HALONGONAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.488.700,00	2.488.700,00	2.488.700,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Halongonan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			3.516.948,00	KECAMATAN HALONGONAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	14.633.600,00	14.633.600,00	14.633.600,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Halongonan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			8.000.000,00	KECAMATAN HALONGONAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.403.900,00	2.403.900,00	2.403.900,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Halongonan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			6.686.557,00	KECAMATAN HALONGONAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.824.000,00	1.824.000,00	1.824.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Halongonan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			5.000.000,00	KECAMATAN HALONGONAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	2 Paket	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Halongonan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			3.000.000,00	KECAMATAN HALONGONAN	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Halongonan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			1.500.000,00	KECAMATAN HALONGONAN	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				17 Laporan	17 Laporan	5.250.000,00	5.250.000,00	1.950.000,00	-3.300.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Halongonan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			7.000.000,00	KECAMATAN HALONGONAN	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>persentase penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan</i>				100 Persen	100 Persen	165.634.000,00	165.634.000,00	165.734.000,00	100.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Halongonan		148.877.000,00	KECAMATAN HALONGONAN	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				4 Laporan	4 Laporan	700.000,00	700.000,00	800.000,00	100.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Halongonan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			1.257.000,00	KECAMATAN HALONGONAN	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Halongonan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			3.620.000,00	KECAMATAN HALONGONAN	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	161.934.000,00	161.934.000,00	161.934.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Halongonan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			144.000.000,00	KECAMATAN HALONGONAN	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah</i>				100 Persen	100 Persen	19.602.000,00	19.602.000,00	19.602.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Halongonan		13.000.000,00	KECAMATAN HALONGONAN	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	1 Unit	19.602.000,00	19.602.000,00	19.602.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Halongonan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			13.000.000,00	KECAMATAN HALONGONAN	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan				-	100 %	2.004.700,00	2.004.700,00	30.185.700,00	28.176.300,00							30.181.000,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				-	1 Tahun	0,00	0,00	28.181.000,00	28.181.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Halongonan		28.181.000,00	KECAMATAN HALONGONAN	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				-	1 Dokumen	0,00	0,00	28.181.000,00	28.181.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			28.181.000,00	KECAMATAN HALONGONAN	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	<i>Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>				1 Kegiatan	100 %	2.004.700,00	2.004.700,00	2.004.700,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Halongonan		2.000.000,00	KECAMATAN HALONGONAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	2.004.700,00	2.004.700,00	2.004.700,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Halongonan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			2.000.000,00	KECAMATAN HALONGONAN
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persenrase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				100 Persen	100 Persen	19.134.000,00	19.134.000,00	19.134.000,00	-9.134.000,00							10.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Keagmaan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	19.134.000,00	19.134.000,00	19.134.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Halongonan		10.000.000,00	KECAMATAN HALONGONAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	19.134.000,00	19.134.000,00	19.134.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Halongonan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			10.000.000,00	KECAMATAN HALONGONAN
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				100 Persen	100 Persen	9.080.000,00	9.080.000,00	45.896.200,00	-2.080.000,00							7.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Hari Besar Yang diperingati				150 Peserta	150 Peserta	9.080.000,00	9.080.000,00	45.896.200,00	36.816.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Halongonan		7.000.000,00	KECAMATAN HALONGONAN
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				200 Orang	200 Orang	9.080.000,00	9.080.000,00	45.896.200,00	36.816.200,00	Kab. Padang Lawas Utara, Halongonan, Hutaimbaru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			7.000.000,00	KECAMATAN HALONGONAN
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persenrase Fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				100 Persen	100 Persen	13.938.000,00	13.938.000,00	13.938.000,00	-3.938.000,00							10.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Peserta Musrenbang Kecamatan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	13.938.000,00	13.938.000,00	13.938.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Halongonan		10.000.000,00	KECAMATAN HALONGONAN
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	13.938.000,00	13.938.000,00	13.938.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Halongonan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			10.000.000,00	KECAMATAN HALONGONAN
		J U M L A H							2.486.642.235,00	2.481.728.834,00	2.413.310.942,00	177.088.576.008,00						2.847.835.837,00		

BAB IV

PENUTUP

Dengan adanya Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026 maka rencana kerja Kecamatan Halongonan merupakan dokumen perencanaan pertama dalam periode RPD. Dimana renja ini berpedoman kepada Renstra Kecamatan Halongonan Tahun 2024-2026 dan RKPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Halongonan Tahun 2025 merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 1 (satu) tahun kedepan.

Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Halongonan Tahun 2025 ini menjadi bahan untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD yang merupakan kesepakatan antara eksekutif dan legislative.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Halongonan Tahun 2025 disusun, diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dan kami berharap masukan dan saran dalam penyusunan Renja Kecamatan Halongonan untuk perbaikan di tahun selanjutnya.

Mutaimbaru, 28 Juli 2025
CAMAT



AMIR HANZAN SIREGAR, S.STP, MM
NIP. 19802 200312 1 001